

Statistik Keuangan Daerah Tk. II Sulawesi Selatan 2012/2013



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

KATA PENGANTAR

Peranan pemerintah daerah didalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah dari tahun ke tahun memperoleh porsi yang semakin besar. Hal tersebut sejalan dengan penerapan program otonomisasi daerah.

Badan Pusat Statistik telah menerbitkan publikasi keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota secara rutin dan berupaya menerbitkan dengan tenggang waktu seminimal mungkin sejak laporan diterima secara lengkap. Mudah-mudahan statistik keuangan pemerintah daerah ini dapat dijadikan salah satu acuan didalam perencanaan selanjutnya dan evaluasi kinerja pembangunan daerah.

Akhirnya disampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penerbitan publikasi ini.

Semoga publikasi ini bermanfaat.

Makassar, Agustus 2014

**BADAN PUSAT STATISTIK
PROPINSI SULAWESI SELATAN
K e p a l a,**

NURSAM SALAM, SE
NIP : 195807111979021001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pendahuluan	1
Liputan	1
Konsep dan Definisi	2
Ulasan Singkat	14

<http://sulsel.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

Tabel A.	Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	17
Tabel B	Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota	18
Tabel C	Realisasi Penerimaan Bagian Pendapatan Yang Berasal Dari Pemberian Pemerintah dan atau Instansi Yang Lebih Tinggi	19
Tabel D	Realisasi Pengeluaran/Belanja Pemda Tingkat II se Sulawesi Selatan	20
Tabel 1.	Realisasi Penerimaan Daerah Pemda Tk. II Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2012-2013(000 Rp)	21
Tabel 1.1	Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pemda Tk. II Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2012-2013(000 Rp)	22
Tabel 1.2	Pemda Tk. II Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2012-2013 (000 Rp)	23
Tabel 1.2.1.	Pemda Tk. II Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2012-2013 (000 Rp)	24
Tabel 1.2.2.	Realisasi Penerimaan Bagian Laba Usaha Daerah Pemda Tk. II Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2012-2013 (000 Rp)	25
Tabel 1.2.3.	Realisasi Penerimaan Lain-Lain Pemda Tk. II Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2012-2013 (000 Rp)	26
Tabel 1.2.4.	Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan Pemda Tk. II Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2012-2013 (000 Rp)	27
Tabel 1.3.	Realisasi Penerimaan Daerah Bagi Hasil Pajak Dan Bukan Pajak Pemda Tk. II Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2012-2013 (000 Rp)	28
Tabel 1.3.1	Realisasi Penerimaan Daerah DAU Pemda Tk. II Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2012-2013 (000 Rp)	29
Tabel 1.3.2	Realisasi Penerimaan Daerah DAK Pemda Tk. II Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2012-2013 (000 Rp)	30
Tabel 1.3.3.	Realisasi Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Pemda Tk. II Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2012-2013 (000 Rp)	31
Tabel 1.3.4.	Realisasi Penerimaan Pendapatan Hibah Pemda Tk. II Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2012-2013 (000 Rp)	32
Tabel 1.3.5.	Realisasi Penerimaan Dana Darurat Pemda Tk. II Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2012-2013 (000 Rp)	33
Tabel 1.4.	Tabel 1.4. Realisasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Pemda Tk. II Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2012-2013 (000 Rp)	34

Tabel 1.4.	Realisasi Penerimaan Dana Penyesuaian Pemda Tk. II Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2012-2013 (000 Rp)	35
Tabel 2.	Realisasi Belanja Pemda Tk. II Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2012 -2013 (000 Rp)	36
Tabel 2.1	Realisasi Belanja Tidak Langsung Pemda Tk. II Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2012(000 Rp)	37
Tabel 2.1.2	Realisasi Belanja Bunga Pemda TK. II Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2012-2013	38
Tabel 2.1.3.	Realisasi Pengeluaran/Belanja Subsidi Pemda Tk.II Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2012-2013 (000 Rp)	39
Tabel 2.1.4.	Realisasi Pengeluaran /Belanja Hibah Pemda Tk.II Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2012-2013 (000 Rp)	40
Tabel 2.1.5.	Realisasi Pengeluaran/Belanja Bantuan Sosial Pemda Tk. II Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2012-2013 (000 Rp)	41
Tabel 2.1.6.	Realisasi Pengeluaran/Belanja Bagi Hasil Kepada Prop/Kab/Kota Pamda Tk.II Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2012 (000 Rp)	42
Tabel 2.2.	Realisasi Belanja Belanja Tidak Terduga Pemda Tk.II Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2012-2013 (000 Rp)	43
Tabel 2.3.	Realisasi Belanja Langsung Pemda Tk. II Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2012-2013 (000 Rp)	44
Tabel 2.3.1	Realisasi Belanja Pegawai Dari Belanja Langsung Pemda Tk.II Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2012-2013 (000 Rp)	45
Tabel 2.3.2.	Realisasi Belanja Barang Dan Jasa Dari Belanja Langsung Pemda Tk.II Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2012-2013 (000 Rp)	46
Tabel 2.3.3.	Realisasi Pengeluaran/Belanja Modal Pemda Tk. II Se Sulawrsi Selatan Tahun Anggaran 2013-2012 (000 Rp)	47

PENJELASAN UMUM

PENDAHULUAN

Peranan pemerintah daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pada era reformasi semakin dituntut serta mendapat porsi yang semakin besar. Hal ini terutama berkaitan dengan program otonomisasi daerah yang telah mulai diterapkan di berbagai daerah Kabupaten/Kota.

Penanganan dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus semakin efektif dan efisien. Untuk itu, statistik keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota semakin diperlukan terutama untuk digunakan :

- 1) Sebagai bahan penghitungan PDRB neraca ekonomi baik tingkat daerah maupun PDB pada tingkat nasional, tabel input-output dan neraca arus dana.
- 2) Memberikan gambaran tentang realisasi anggaran pendapatan dan belanja yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah.
- 3) Untuk mengetahui potensi dan peranan sumber dana masing-masing daerah.
- 4) Sebagai informasi bagi pemerintah pusat untuk menentukan jenis dan besarnya bantuan pembangunan untuk masing-masing daerah.

LIPUTAN

Data dalam publikasi ini diperoleh melalui Bagian Keuangan Kantor Bupati/Walikota Daerah Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan yang terdiri dari :

- 1) Realisasi penerimaan daerah otonomi Kabupaten/Kota menurut sumber penerimaan selama tahun anggaran 2012 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2013.
- 2) Realisasi pengeluaran pemerintah daerah Kabupaten/Kota dirinci menurut jenis pengeluaran selama tahun anggaran 2012 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2013.

KONSEP DAN DEFINISI

Daftar isian keungan daerah kabupaten/kota (K-2) digunakan untuk mencatat data statistik keuangan meliputi realisasi penerimaan dan pengeluaran pemerintah kabupaten/kota. Dalam daftar isian tersebut terdapat beberapa konsep dan definisi yang terkait dengan struktur laporan keuangan kabupaten/kota. Konsep dan definisi tersebut sudah baku sesuai dengan Permendagri No.13 tahun 2006. berikut ini beberapa penjelasan dan definisi dalam daftar isian K2.

PENERIMAAN DAERAH

Penerimaan daerah dalam struktur laporan keuangan kabupaten/kota, secara umum terdiri atas pendaoatan daerah dan pembiayaan.

Pendapatan daerah bersumber dari :

1. pendapatan asli daerah
2. dana perimbangan
3. lain-lain pendapatan yang sah

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Adalah pendapatn yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengumpulan dana tersebut bertujuan untuk membiayai berbagai keperluan daerah yang bersangkutan. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pajak Daerah

Adalah pungutan yang dilakukan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Pajak daerah ini dapat dibedakan dalam dua kategori, yaitu pajak daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah dan pajak negara yang pengelolaan dan penggunaannya diserahkan kepada daerah,. Penerimaan pajak daerah antara lain pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, galian golongan c, parkir, dan lain-lain.

Retribusi Daerah

Adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perijinan tertentu. Retribusi jasa umum meliputi retribusi pelayanan kesehatan, persampahan/kebersihan, biaya KTP dan akte catatan sipil, pelayanan pemakaman, pelayanan parkir tepi jalan umum, pasar, pengujian kendaraan bermotor, pemeriksaan alat pemadam kebakaran, penggantian biaya cetak peta dan retribusi pelayanan pendidikan. Retribusi jasa usaha mencakup retribusi pemakaian kekayaan daerah, pasar grosir/pertokoan, terminal, rumha

potong hewan, tempat rekreasi/olahraga dan sejenisnya. Retribusi perijinan tertentu meliputi retribusi ijin mendirikan bangunan, ijin peruntukan penggunaan tanah, ijin trayek dan lain-lain.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan yang berupa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, terdiri dari bagian laba atas penertaan modal/investasi

Pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal/investasi pada perusahaan milik pemerintah/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal/investasi pada perusahaan milik swasta.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terdiri dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan bunga, penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah (TGR), komisi, potongan dan keuntungan selisih nilai tukar rupiah, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, denda pajak, denda retribusi, hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatn dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendpatan dari angsuran/cicilan penjualan, dan lain-lain.

Dana Perimbangan

Adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari bagi hasil pajak/bukan pajak. Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Bagi Hasil Pajak

Bagi hasil pajak adalah bagian daerah yang berasal dari pendapatan Pajak Bumi dan Banugunan (PBB), Pendapatn Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BHTPB), Pajak penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 Waib pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, dan PPh Pasal 21 orang pribadi (termasuk PPh Pasal 21), dan lain-lain.

Bagi Hasil Bukan Pajak

Pendapatan bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam berasal dari pendapatan Iuran Hak Pengusaha Hutan (IHPH), provisi sumber daya alam kehutanan, dana reboisasi, pungutan pengusaha perikanan dan hasil perikanan, pertambangan gas bumi dan pertambangan panas bumi.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana alokasi umum (DAU) adalah transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup kesenjangan fiskal (fiscal gap) dan pemerataan kemampuan fiskal antara daerah dalam rangka membantu kemandirian pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang disediakan kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus. Ada tiga kriteria dari kebutuhan khusus seperti ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu, :

- Kebutuhan tidak dapat diperhitungkan dengan menggunakan rumus DAU
- Kebutuhan merupakan komitmen atau prioritas nasional
- Kebutuhan untuk membiayai kegiatan reboisasi dan penghijauan oleh daerah penghasil

Dengan demikian Dak pada dasarnya merupakan transfer yang bersifat spesifik untuk tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan.

Lain-lain Pendapatan yang Sah

Adalah pendapatan lainnya dari pemerintah pusat dan atau dari instansi pusat, serta dari daerah lainnya. Lain-lain pendapatan yang sah terdiri pendapatn hibah, dana darurat, bagi hasil pajak provinsi, dana penyesuaian dan otonomi khusus, dan bantuan keuangan provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

BELANJA DAERAH

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Belanja daerah terdiri dari :

1. Belanja Tak Langsung
2. Belanja Langsung

Belanja Tak Langsung

Adalah bagian belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program. Belanja tak langsung terdiri dari : belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan yang telah ditetapkan

undang-undang, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan, serta belanja tak terduga.

Belanja Pegawai

Adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang diberikan kepada DPRD, dan pegawai pemerintah daerah baik yang bertugas di dalam maupun di luar daerah sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Belanja Bunga

Adalah pembayaran bunga utang, pembayaran yang dilakuakn atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*), yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang.

Belanja Subsidi

Adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membiayai produksi agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

Belanja Hibah

Adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian uang/barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya,

bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus-menerus.

Belanja Bantuan Sosial

Adalah pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif dalam bentuk uang/barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

Adalah belanja yang telah dianggarkan sebagai dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan kabupaten/kota kepada provinsi, kabupaten/kota, desa, atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja bagi hasil ini terdiri dari :

- Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah provinsi
- Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota
- Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa
- Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah kabupaten/kota
- Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi?Kabupaten?Kota dan Pemerintah Desa

Adalah pemberian bantuan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa, atau

Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan 8

pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan atau peningkatan kemampuan keuangan. Bantuan keuangan yang bersifat umum, peruntukan dan penggunaannya diarahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah desa penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan.

Bantuan Keuangan ini terdiri dari :

- Bantuan Keuangan kepada pemerintah provinsi
- Bantuan Keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota
- Bantuan Keuangan kepada pemerintah desa
- Bantuan Keuangan kepada pemerintah daerah/pemerintah desa lainnya

Belanja Tidak Terduga

Adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Belanja Langsung

Adalah bagian belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah dan telah dianggarkan oleh pemerintah desa.

Belanja Pegawai

Adalah pengeluaran untuk honorarium/upah, lembur dan pengeluaran lain untuk meningkatkan motivasi dan kualitas pegawai dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Belanja Barang dan Jasa

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari setahun, dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Pembelian/pengadaan barang dan jasa yang dimaksud meliputi bahan pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak dan pengadaan, sewa gedung, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atribut, pakaian kerja, pakaian khusus hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan pindah tugas, pemulangan pegawai dan lain-lain belanja barang dan jasa.

Belanja Modal

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang nilai manfaatnya lebih dari setahun, dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Pembentukan aset tersebut meliputi pengadaan tanah, alat-alat berat, alat-alat angkutan, alat-alat bengkel, peralatan dan perlengkapan kantor, komputer, meubelair, peralatan dapur, penghias ruangan, alat-alat studio, alat-alat komunikasi, alat-alat ukur, alat-alat kedokteran, alat-alat laboratorium, konstruksi jalan, jembatan, jaringan air, penerangan jalan, taman dan hutan kota, instalasi listrik

dan telepon, bangunan, buku/kepustakaan, barang seni, pengadaan hewan/ternak dan tanaman, serta persenjataan/keamanan.

PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah terdiri dari :

a. **Penerimaan Pembiayaan Daerah**

1. **Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya**

Adalah bagian penerimaan anggaran yang didapat dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatn yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban pihak ketiga sampai akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

2. **Pencarian Dana Cadangan**

Adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari pencarian dana cadangan dari rekening cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

3. **Hasil Penjualan Kekayaan Daerah**

Adalah semua penjualan aset milik pemerintha daerah yang dikerjasamakan oleh pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.

4. **Penerimaan Pinjaman Daerah**

Adalah semua penerimaan dari pinjman daerah, termasuk penerimaan atas penertiban obligasi daerah yang direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.

5. **Penerimaan Kembali Pemberi Pinjaman**

Adalah semua penerimaan kembali dari pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat, provinsi dan/atau pemerintah daerah lainnya.

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

1. Pembentukan Dana Cadangan

Adalah pengeluaran untuk membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/spenuhnya dibebankan dalam satu tahun.

2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

Adalah pengeluaran daerah yang dialokasikan pada penyertaan modal/ investasi pemerintah daerah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, permanen atau non permanen. Investasi ini berupa deposito berjangka, pembelian Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Perbendaharaan Negara (SPN), saham, penanaman modal pada BUMN/BUMD, pembelian obligasi dan surat utang jangka panjang.

3. Pembayaran Pokok Utang

Adalah pembayaran kewajiban atas pokok utnag ynag dihitung berdasarkan perjanjian pinjman jangka panjang.

4. Pemberian Pinjaman Daerah

Adalah pengeluaran pemerintah daerah untuk pemberian kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau pihak ketiga.

c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

Pos ini digunakan untuk mengetahui pembiayaan neto, yang merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.

ULASAN SINGKAT

Langkah dan upaya pemerintah dalam menggalakkan otonomisasi daerah di tingkat Kabupaten/Kota pada hakekatnya adalah untuk mendorong gerak roda pembangunan di daerah yaitu melalui optimalisasi kinerja pemerintah daerah, yang pada akhirnya lebih mendorong pertumbuhan perekonomian daerah menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan dikurangnya ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat terutama dalam hal pembiayaan pembangunan daerah, maka Pemerintah

Tabel A. Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan T.A. 2012-2013

Tahun	Realisasi (Juta Rp)	Perubahan (persen)
2011	11.498.561	10,11
2012	17,426,464	51,55
2013	19,502,566,	11,91

Daerah dituntut lebih berupaya menggali segala potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah.

Propinsi Sulawesi Selatan selain sebagai pintu gerbang kawasan

Timur Indonesia juga memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar terutama pertanian/pertambangan/penggalian dan pariwisata. Dengan letak geografis yang strategis dengan potensi alam yang dimiliki. Program otonomisasi adalah menjadi suatu peluang untuk percepatan pembangunan daerah.

Untuk membiayai pembangunan memerlukan dana yang tidak sedikit. Dana untuk pembiayaan pembangunan daerah terutama digali dari sumber kemampuan sendiri dengan prinsip peningkatan kemandirian dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan kata lain pemerintah daerah dipacu untuk meningkatkan kemampuan seoptimal mungkin di dalam membelanjai urusan rumah tangga sendiri, dengan cara menggali segala sumber dana yang potensial yang ada di daerah tersebut. Dalam hubungan ini pengelolaan APBD terus disempurnakan agar dapat menghimpun dana yang cukup untuk membiayai pembangunan.

A. PENERIMAAN DAERAH

Penerimaan daerah diharapkan terus meningkat dari tahun ke tahun sejalan dengan semakin meningkatnya kebutuhan belanja daerah baik belanja rutin maupun belanja pembangunan. Peningkatan penerimaan daerah khususnya dari pos pendapatan asli daerah (PAD) merupakan suatu hal yang harus terus diupayakan menuju terwujudnya otonomisasi daerah yang lebih nyata.

Total penerimaan Pemerintah Daerah se Propinsi Sulawesi Selatan selama tiga tahun anggaran terakhir secara riil terus mengalami peningkatan. Pada tahun anggaran 2013 realisasi penerimaan sebesar 19.502.566 juta rupiah meningkat sebesar 11,91 persen dibanding keadaan tahun anggaran sebelumnya. Sedangkan

pada tahun anggaran 2012 diperoleh penerimaan sebesar 17.426.464 juta rupiah atau meningkat sebesar 51,55 persen dibanding total penerimaan pada tahun anggaran 2011 .

Secara umum, sumber penerimaan daerah terdiri dari beberapa jenis penerimaan, namun secara garis besar dapat dirinci dalam 3 kelompok sebagai berikut :

I) Pendapatan Asli Daerah

Tabel B. Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan
Dirinci Menurut Jenis Penerimaan T.A. 2012-2013 (000 Rp)

Uraian	2012	2013
(1)		(3)
1. Pendapatan Asli Daerah	1,383,780,466	1,638,123,716
2. Dana Perimbangan	13,252,925,214	14,970,617,781
3. Lain-lain pendapatan yang sah	2,789,758,642	2,893,824,708
Penerimaan Daerah	17,426,464,322	19,502,566,205

Ket : *) Tanpa Kota Makassar dan Kabupaten Pangkep

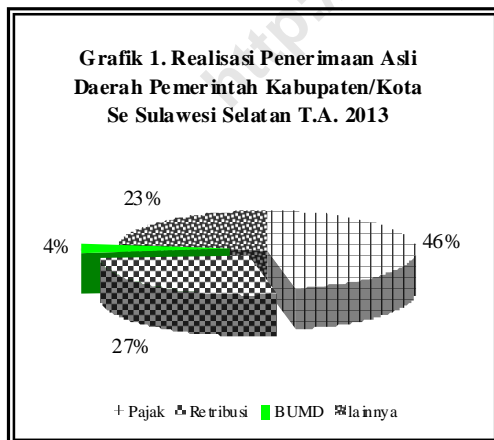
Besarnya penerimaan dari pendapatan asli daerah (PAD) sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah menggali potensi yang dimilikinya.

Jumlah dan peningkatan penerimaan dari PAD tersebut akan memberikan gambaran mengenai kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pembiayaan pembangunan secara lebih mandiri.

Total Pendapatan Asli;I Daerah (PAD)

Tabel B. Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Dirinci Menurut Jenis Penerimaan T.A. 2012-2013 (000 Rp)

Uraian	2012	2013
(1)	(2)	
1. Pajak Daerah	683,453,097	757,448,565
2. Retribusi Daerah	406,620,603	429,491,633
3. Laba usaha daerah	67,174,229	61,162,525
4. Lainnya	211,386,156	362,526,186
Pendapatan Asli Daerah	1,383,780,466	1,638,123,716



Pada tahun anggaran 2013, PAD Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan adalah sebesar 1.638.123 juta rupiah, Dari jumlah tersebut, retribusi daerah dan pajak daerah merupakan kontributor utama, keduanya pada tahun anggaran 2013 menempatkan retribusi daerah

mencapai sebesar 429.491 juta rupiah atau 27 persen dari total PAD, dan pajak daerah sebesar 757.448 juta rupiah atau 46 persen dari total PAD . Namun

kontribusi PAD terhadap total penerimaan mengalami kenaikan yaitu pada tahun anggaran 2012 sebesar 7,94 persen, pada tahun anggaran 2013 naik menjadi 8,40 persen.

Bagian dari PAD yang menunjukkan kenaikan yang sangat besar adalah dari penerimaan pajak daerah yang naik sebesar 20,12 persen yaitu dari 1.383.780 juta rupiah pada tahun 2012 menjadi 1.638.123 juta rupiah pada tahun 2013.

2) *Bagian Dana Perimbangan*

Tabel C. Realisasi Penerimaan Bagian Pendapatan Yang Berasal Dari Pemberian Pemerintah dan atau Instansi Yang Lebih Tinggi Pemda Se Sulawesi Selatan Dirinci Menurut Jenis Penerimaan T.A. 2011-2012 (000 Rp)

Uraian	2012	2013
(1)	(2)	(3)
1. Bagi Hasil Pajak & Bukan pajak	1,031,040,138	910,502,556
2. Dana Alokasi Umum	11,036,726,476	12,665,297,745
3. Dana Alokasi Khusus	1,185,158,600	1,394,817,480

Penerimaan terbesar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan berasal dari penerimaan dari Dana Perimbangan yang berasal dari pemberian Pemerintah dan atau Instansi yang lebih tinggi, pada tahun anggaran 2012 sebesar 13,252,925 juta rupiah menjadi 14,970,617 juta rupiah pada tahun anggaran 2013 atau meningkat sebesar 12,96 persen. Kontribusinya terhadap total

penerimaan, pada tahun anggaran 2012 sebesar 76,05 persen, pada tahun anggaran 2013 sebesar 76,76 persen.

Dari bagian pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah dan atau instansi yang lebih tinggi yang menunjukkan kenaikan yang sangat besar adalah dari Dana Alokasi Umum yaitu sebesar 14,76 persen yaitu dari 11.036.726 juta rupiah pada tahun 2012 menjadi 12.665.297 juta rupiah pada tahun 2013.

4. Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Dibandingkan dengan keadaan pada tahun Anggaran 2012, maka tahun anggaran 2013 kontribusi Lain-lain Pendapatan Yang Sah terhadap total penerimaan mengalami kenaikan sebesar 3,73 % yaitu dari 2,789,758 juta rupiah pada tahun 2012 menjadi 2,893,824 juta rupiah pada tahun 2013.

B. PENGELUARAN DAERAH

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri No.29 Tahun 2002 Pengeluaran daerah terdiri dari 2 jenis yaitu pengeluaran belanja Tidak

Tabel D Realisasi Pengeluaran/Belanja Pemda Tingkat II se Sulawesi Selatan
(juta rupiah)

BELANJA	2012	2013
Belanja tidak langsung	9,814,038	11,284,506
Belanja langsung	6,859,614	8,568,788
jumlah	16,673,652	19,853,294

Langsung dan Belanja Langsung, sedang format lama terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin diantaranya adalah belanja pegawai, belanja barang,

biaya pemeliharaan. Sedangkan pengeluaran pembangunan diantaranya adalah pengeluaran untuk sektor industri, transportasi, tenaga kerja, dsb.

Pada tahun anggaran 2013, total pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebesar 19.853.294 juta rupiah, dimana 11.284.506 juta rupiah (56,84 persen) diantaranya adalah merupakan pengeluaran/belanja Tidak Langsung Daerah sedangkan sisanya sebesar 8.568.788

juta rupiah (43.16 persen) adalah pengeluaran/belanja langsung Pemda TK II se Sulawesi Selatan .

<http://sulsel.bps.go.id>

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Daerah Pemda Tk. II Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2012-2013 (000 Rp)

Kabupaten/Kotamadya	2012	2013
01. Selayar	505,714,674	602,250,393
02. Bulukumba	753,739,986	842,201,535
03. Bantaeng	479,362,668	591,958,074
04. Jeneponto	629,479,280	698,993,703
05. Takalar	606,117,288	677,138,064
06. Gowa	921,069,186	1,000,084,556
07. Sinjai	575,936,852	641,023,229
08. Maros	728,015,705	931,492,368
09. Pangkep	747,260,525	867,847,952
10. Barru	529,625,873	599,432,712
11. Bone	1,198,004,102	1,393,490,870
12. Soppeng	636,079,331	710,997,137
13. Wajo	894,414,507	1,000,945,576
14. Sidrap	657,567,423	808,559,044
15. Pinrang	740,304,317	805,269,988
16. Enrekang	555,707,823	641,578,028
17. Luwu	589,610,948	738,611,464
18. Tator	687,459,489	654,814,152
19. Luwu Timur*	681,166,438	797,407,040
20. Luwu Utara	692,442,567	732,077,338
21. Toraja Utara	507,094,586	562,823,851
22. Makassar	2,050,507,756	1,944,588,944
23. Pare-Pare	534,261,112	637,420,313
24. Palopo	525,521,885	562,823,851
Jumlah	17,426,464,322	19,502,566,205

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
Pemda Tk. II Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2012-2013
(000 Rp)

Kabupaten/Kotamadya	2012	2013
01. Selayar	17,229,721	21,262,899
02. Bulukumba	25,173,341	37,297,323
03. Bantaeng	21,990,844	24,559,306
04. Jeneponto	14,893,817	20,000,000
05. Takalar	32,935,638	33,660,231
06. Gowa	78,700,220	80,129,434
07. Sinjai	21,834,741	21,218,515
08. Maros	60,364,409	102,470,000
09. Pangkep	73,048,165	82,512,729
10. Barru	30,260,170	27,577,817
11. Bone	52,347,658	85,927,450
12. Soppeng	25,894,587	33,699,412
13. Wajo	55,172,195	60,526,808
14. Sidrap	36,158,852	44,146,778
15. Pinrang	29,604,660	35,036,612
16. Enrekang	17,920,619	20,670,060
17. Luwu	31,720,677	25,100,000
18. Tator	29,322,233	32,494,899
19. Luwu Timur*	37,855,218	145,128,505
20. Luwu Utara	98,100,072	43,833,426
21. Toraja Utara	16,512,051	30,220,213
22. Makassar	487,897,396	525,847,897
23. Pare-Pare	52,629,180	84,978,625
24. Palopo	36,214,002	30,220,213
Jumlah	1,383,780,466	1,638,123,716

Tabel 1.2 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah
Pemda Tk. II Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2012-2013
(000 Rp)

Kabupaten/Kotamadya	2012	2013
01. Selayar	2,101,870	2,144,500
02. Bulukumba	7,287,604	7,656,551
03. Bantaeng	3,449,494	2,995,950
04. Jeneponto	3,976,488	3,314,000
05. Takalar	3,826,186	3,581,250
06. Gowa	35,655,815	42,751,000
07. Sinjai	3,621,248	3,897,700
08. Maros	35,807,403	46,399,000
09. Pangkep	41,702,438	46,950,034
10. Barru	4,222,609	6,670,000
11. Bone	14,648,182	14,895,850
12. Soppeng	3,481,525	3,376,500
13. Wajo	8,923,457	9,815,000
14. Sidrap	6,589,877	7,533,093
15. Pinrang	6,940,221	5,141,056
16. Enrekang	2,999,321	2,000,000
17. Luwu	3,736,530	5,747,053
18. Tator	5,962,461	2,398,050
19. Luwu Timur*	4,659,989	72,028,200
20. Luwu Utara	69,822,891	5,624,730
21. Toraja Utara	4,441,615	6,214,743
22. Makassar	388,445,926	436,725,028
23. Pare-Pare	12,161,926	13,000,000
24. Palopo	8,988,020	6,214,743
Jumlah	683,453,097	757,448,565

Tabel 1.2.1. Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah
Pemda Tk. II Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2012-2013
(000 Rp)

Kabupaten/Kotamadya	2012	2013
01. Selayar	2,187,788	2,500,000
02. Bulukumba	8,923,658	15,125,786
03. Bantaeng	10,338,077	14,063,606
04. Jeneponto	3,105,596	3,926,500
05. Takalar	20,476,884	22,417,629
06. Gowa	31,223,980	28,285,037
07. Sinjai	6,554,470	6,818,135
08. Maros	18,708,455	27,751,000
09. Pangkep	14,969,534	21,337,628
10. Barru	16,898,601	13,861,817
11. Bone	11,719,239	14,864,599
12. Soppeng	14,787,980	7,669,712
13. Wajo	15,485,564	20,682,027
14. Sidrap	20,727,510	24,013,722
15. Pinrang	10,881,454	19,871,556
16. Enrekang	6,897,026	9,076,622
17. Luwu	22,338,063	13,540,817
18. Tator	9,695,008	24,046,292
19. Luwu Timur*	25,607,402	16,740,305
20. Luwu Utara	14,659,294	30,307,043
21. Toraja Utara	6,404,621	5,698,170
22. Makassar	83,648,708	70,300,940
23. Pare-Pare	8,202,283	9,612,625
24. Palopo	22,179,409	5,698,170
Jumlah	406,620,603	429,491,633

Tabel 1.2.2. Realisasi Penerimaan Bagian Laba Usaha Daerah
Pemda Tk. II Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2012-2013
(000 Rp)

Kabupaten/Kotamadya	2012	2013
01. Selayar	981,616	1,137,000
02. Bulukumba	1,168,535	3,422,875
03. Bantaeng	1,391,633	1,387,400
04. Jeneponto	342,117	557,000
05. Takalar	452,851	1,460,820
06. Gowa	1,198,604	1,134,740
07. Sinjai	1,772,496	2,333,108
08. Maros	8,178,553	0
09. Pangkep	769,753	1,294,431
10. Barru	1,299,760	1,241,815
11. Bone	1,638,207	1,937,947
12. Soppeng	3,776,149	3,721,747
13. Wajo	1,118,677	4,157,000
14. Sidrap	1,548,584	7,634,786
15. Pinrang	799,592	1,068,900
16. Enrekang	929,617	1,457,059
17. Luwu	3,069,888	1,561,680
18. Tator	651,897	4,461,600
19. Luwu Timur*	1,596,626	1,688,300
20. Luwu Utara	1,492,873	824,240
21. Toraja Utara	3,545,526	947,152
22. Makassar	27,047,611	11,490,888
23. Pare-Pare	1,504,025	2,042,730
24. Palopo	899,039	947,152
Jumlah	67,174,229	61,162,525

Tabel 1.2.3. Realisasi Penerimaan Lain-Lain
Pemda Tk. II Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2012-2013
(000 Rp)

Kabupaten/Kotamadya	2012	2013
01. Selayar	6,378,280	9,000,000
02. Bulukumba	8,338,496	13,514,986
03. Bantaeng	4,370,524	3,667,000
04. Jeneponto	3,852,985	9,125,500
05. Takalar	3,686,337	3,072,210
06. Gowa	9,816,228	5,441,000
07. Sinjai	9,331,997	8,102,680
08. Maros	3,757,145	23,820,000
09. Pangkep	8,938,835	7,195,067
10. Barru	4,682,630	2,500,000
11. Bone	24,177,199	54,177,416
12. Soppeng	5,189,800	20,143,200
13. Wajo	24,983,632	24,249,781
14. Sidrap	5,010,065	7,899,962
15. Pinrang	5,608,001	3,850,000
16. Enrekang	5,132,223	6,665,623
17. Luwu	4,607,384	4,805,556
18. Tator	10,851,039	3,212,130
19. Luwu Timur*	6,523,174	6,837,000
20. Luwu Utara	8,370,672	50,560,000
21. Toraja Utara	5,665,815	5,094,280
22. Makassar	9,354,218	11,919,495
23. Pare-Pare	29,527,294	59,366,000
24. Palopo	3,232,184	18,307,300
Jumlah	211,386,156.	362,526,186

Pemda Tk. II Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2012-2013
(000 Rp)

Kabupaten/Kotamadya	2012	2013
01. Selayar	436,943,368	523,305,453
02. Bulukumba	605,028,711	688,597,358
03. Bantaeng	392,630,065	467,881,346
04. Jeneponto	528,943,117	594,908,685
05. Takalar	482,167,645	554,716,823
06. Gowa	681,321,000	765,010,207
07. Sinjai	481,981,443	547,838,985
08. Maros	541,142,618	641,748,652
09. Pangkep	570,337,454	683,597,806
10. Barru	427,930,187	485,124,985
11. Bone	913,646,370	1,028,563,165
12. Soppeng	513,337,274	602,144,705
13. Wajo	707,011,202	781,157,737
14. Sidrap	514,053,343	574,947,474
15. Pinrang	579,782,560	662,398,551
16. Enrekang	459,138,098	521,450,520
17. Luwu	477,282,522	617,654,069
18. Tator	556,600,331	521,956,295
19. Luwu Timur*	537,612,712	517,664,631
20. Luwu Utara	488,535,243	606,417,751
21. Toraja Utara	420,332,975	469,051,511
22. Makassar	1,104,310,676	1,148,037,849
23. Pare-Pare	411,474,441	458,223,832
24. Palopo	421,381,856	469,051,511
Jumlah	13,252,925,214	14,970,617,781

Tabel 1.3. Realisasi Penerimaan Daerah Bagi Hasil Pajak Dan Bukan Pajak Pemda Tk. II Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2012-2013
(000 Rp)

Kabupaten/Kotamadya	2012	2013
01. Selayar	24,728,853	26,890,000
02. Bulukumba	32,776,802	32,157,734
03. Bantaeng	28,068,283	34,703,830
04. Jeneponto	29,353,411	24,526,398
05. Takalar	26,051,242	26,686,212
06. Gowa	40,120,533	22,767,846
07. Sinjai	27,188,189	26,455,691
08. Maros	35,406,851	50,159,820
09. Pangkep	37,914,961	38,467,529
10. Barru	26,993,419	23,469,166
11. Bone	70,178,318	72,504,854
12. Soppeng	33,095,055	35,062,943
13. Wajo	118,658,974	115,427,210
14. Sidrap	39,811,003	33,416,391
15. Pinrang	32,706,021	25,000,000
16. Enrekang	32,599,915	36,000,000
17. Luwu	23,346,060	15,845,669
18. Tator	26,498,818	21,259,516
19. Luwu Timur	36,846,096	67,780,380
20. Luwu Utara	77,981,234	40,585,465
21. Toraja Utara	19,627,369	21,280,590
22. Makassar	160,543,559	73,567,946
23. Pare-Pare	28,547,328	28,329,539
24. Palopo	21,997,841	21,280,590
Jumlah	1,031,040,138	910,502,556

Tabel 1.3.1 Realisasi Penerimaan Daerah DAU
Pemda Tk. II Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2012-2013
(000 Rp)

Kabupaten/Kotamadya	2012	2013
01. Selayar	365,634,515	421,256,593
02. Bulukumba	520,529,199	591,388,184
03. Bantaeng	325,057,232	379,463,356
04. Jeneponto	437,703,926	494,087,427
05. Takalar	409,280,603	479,073,701
06. Gowa	586,415,307	670,579,761
07. Sinjai	416,771,464	474,528,814
08. Maros	455,829,227	540,383,322
09. Pangkep	485,962,003	566,929,217
10. Barru	358,904,488	417,942,379
11. Bone	754,025,482	867,813,851
12. Soppeng	446,410,179	517,805,122
13. Wajo	513,517,208	592,275,827
14. Sidrap	432,894,860	499,699,753
15. Pinrang	502,508,309	574,244,531
16. Enrekang	384,422,103	436,542,180
17. Luwu	389,286,812	542,118,000
18. Tator	475,295,053	444,741,329
19. Luwu Timur*	457,250,496	410,974,651
20. Luwu Utara	365,829,499	512,644,776
21. Toraja Utara	348,127,616	408,527,791
22. Makassar	911,122,797	1,033,583,903
23. Pare-Pare	332,564,413	384,096,063
24. Palopo	361,383,685	408,527,791
Jumlah	11,036,726,476	12,665,297,745

Tabel 1.3.2 Realisasi Penerimaan Daerah DAK
Pemda Tk. II Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2012-2013
(000 Rp)

Kabupaten/Kotamadya	2012	2013
01. Selayar	46,580,000	75,158,860
02. Bulukumba	51,722,710	65,051,440
03. Bantaeng	39,504,550	53,714,160
04. Jeneponto	61,885,780	76,294,860
05. Takalar	46,835,800	48,956,910
06. Gowa	54,785,160	71,662,600
07. Sinjai	38,021,790	46,854,480
08. Maros	49,906,540	51,205,510
09. Pangkep	46,460,490	78,201,060
10. Barru	42,032,280	43,713,440
11. Bone	89,442,570	88,244,460
12. Soppeng	33,832,040	49,276,640
13. Wajo	74,835,020	73,454,700
14. Sidrap	41,347,480	41,831,330
15. Pinrang	44,568,230	63,154,020
16. Enrekang	42,116,080	48,908,340
17. Luwu	64,649,650	59,690,400
18. Tator	54,806,460	55,955,450
19. Luwu Timur*	43,516,120	38,909,600
20. Luwu Utara	44,724,510	53,187,510
21. Toraja Utara	52,577,990	39,243,130
22. Makassar	32,644,320	40,886,000
23. Pare-Pare	50,362,700	45,798,230
24. Palopo	38,000,330	39,243,130
Jumlah	1,185,158,600	1,394,817,480

Tabel 1.3.3. Realisasi Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah
Pemda Tk. II Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2012-2013
(000 Rp)

Kabupaten/Kotamadya	2012	2013
01. Selayar	51,541,585	57,682,041
02. Bulukumba	123,537,935	116,306,855
03. Bantaeng	64,741,759	99,517,422
04. Jeneponto	85,642,346	84,085,018
05. Takalar	91,014,005	88,761,010
06. Gowa	161,047,966	154,944,915
07. Sinjai	72,120,668	71,965,729
08. Maros	126,508,678	187,273,716
09. Pangkep	103,874,906	101,737,417
10. Barru	71,435,515	86,729,911
11. Bone	232,010,074	279,000,255
12. Soppeng	96,847,470	75,153,020
13. Wajo	132,231,110	159,261,031
14. Sidrap	107,355,227	189,464,792
15. Pinrang	130,917,097	107,834,825
16. Enrekang	78,649,106	99,457,448
17. Luwu	80,607,748	95,857,395
18. Tator	101,536,925	100,362,958
19. Luwu Timur*	105,698,509	134,613,905
20. Luwu Utara	105,807,251	81,826,161
21. Toraja Utara	70,249,560	63,552,127
22. Makassar	458,299,684	270,703,198
23. Pare-Pare	70,157,491	94,217,856
24. Palopo	67,926,027	63,552,127
Jumlah	2,789,758,642	2,893,824,708

Tabel 1.3.4. Realisasi Penerimaan Pendapatan Hibah
Pemda Tk. II Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2012-2013
(000 Rp)

Kabupaten/Kotamadya	2012	2013
01. Selayar	0	0
02. Bulukumba	0	0
03. Bantaeng	0	682,914
04. Jeneponto	0	700,890
05. Takalar	0	482,700
06. Gowa	0	0
07. Sinjai	0	0
08. Maros	0	15,000,000
09. Pangkep	0	1,595,680
10. Barru	9,759,372	0
11. Bone	0	3,000,000
12. Soppeng	0	671,830
13. Wajo	24,208,227	597,055
14. Sidrap	0	0
15. Pinrang	0	2,000,000
16. Enrekang	13,687,468	603,170
17. Luwu	50,478,933	1,154,450
18. Tator	157,445	2,100,000
19. Luwu Timur*	0	0
20. Luwu Utara	73,109	2,083,240
21. Toraja Utara	0	0
22. Makassar	1,457,747	0
23. Pare-Pare	0	0
24. Palopo	0	0
Jumlah	99,822,301	30,771,929

Tabel 1.3.5. Realisasi Penerimaan Dana Darurat
Pemda Tk. II Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2012-2013
(000 Rp)

Kabupaten/Kotamadya	2012	2013
01. Selayar	0	0
02. Bulukumba	0	0
03. Bantaeng	0	0
04. Jeneponto	0	0
05. Takalar	0	0
06. Gowa	0	0
07. Sinjai	0	0
08. Maros	0	0
09. Pangkep	0	0
10. Barru	0	0
11. Bone	0	0
12. Soppeng	0	0
13. Wajo	0	0
14. Sidrap	0	0
15. Pinrang	0	0
16. Enrekang	0	0
17. Luwu	0	0
18. Tator	0	0
19. Luwu Timur*	0	0
20. Luwu Utara	0	0
21. Toraja Utara	0	0
22. Makassar	49,996,980	0
23. Pare-Pare	0	0
24. Palopo	0	0
Jumlah	49,996,980	0

Tabel 1.4. Realisasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi
Pemda Tk. II Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2012-2013
(000 Rp)

Kabupaten/Kotamadya	2012	2013
01. Selayar	10,026,915	10,500,000
02. Bulukumba	20,290,069	14,294,500
03. Bantaeng	11,840,541	11,410,153
04. Jeneponto	13,906,706	13,756,000
05. Takalar	18,727,748	11,555,372
06. Gowa	36,522,047	32,124,501
07. Sinjai	14,326,464	14,307,975
08. Maros	26,471,981	29,630,600
09. Pangkep	24,641,178	20,000,000
10. Barru	15,209,519	13,677,981
11. Bone	31,750,484	32,379,730
12. Soppeng	15,844,250	12,716,366
13. Wajo	25,375,242	26,100,000
14. Sidrap	23,483,543	36,693,671
15. Pinrang	24,816,974	15,200,000
16. Enrekang	12,690,645	12,000,000
17. Luwu	16,326,231	18,865,006
18. Tator	18,019,265	12,800,000
19. Luwu Timur*	17,291,263	18,161,831
20. Luwu Utara	56,738,564	83,160,000
21. Toraja Utara	60,392,140	14,085,710
22. Makassar	146,522,332	185,667,052
23. Pare-Pare	22,244,632	30,000,000
24. Palopo	19,403,581	17,430,614
Jumlah	682,862,315	686,517,061

Tabel 1.4. Realisasi Penerimaan Dana Penyesuaian
Pemda Tk. II Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2012-2013
(000 Rp)

Kabupaten/Kotamadya	2012	2013
01. Selayar	33,182,041	33,182,041
02. Bulukumba	82,699,467	82,699,467
03. Bantaeng	40,820,067	77,779,400
04. Jeneponto	54,459,862	54,459,862
05. Takalar	59,479,153	61,032,843
06. Gowa	95,865,273	95,865,273
07. Sinjai	56,570,368	57,657,754
08. Maros	84,136,806	122,643,116
09. Pangkep	61,779,343	63,415,779
10. Barru	46,466,624	62,551,930
11. Bone	175,430,662	205,216,013
12. Soppeng	68,502,486	48,555,181
13. Wajo	82,502,476	110,453,309
14. Sidrap	59,854,189	113,733,450
15. Pinrang	85,508,242	73,928,289
16. Enrekang	52,270,992	69,839,106
17. Luwu	0	68,068,588
18. Tator	65,140	65,139,570
19. Luwu Timur*	74,209,006	47,510,518
20. Luwu Utara	36,681,273	37,696,282
21. Toraja Utara	0	0
22. Makassar	0	24,963,585
23. Pare-Pare	37,379,685	53,824,362
24. Palopo	39,581,860	39,704,860
Jumlah	1,327,445,015	1,669,920,577

Tabel 1. Realisasi Belanja Tidak Langsung Pemda Tk. II Se Sulawesi Selatan
Tahun Anggaran 2012- 2013(000 Rp)

Kabupaten/Kotamadya	2012	2013
01. Selayar	267,608,210	299,956,197
02. Bulukumba	488,875,126	543,394,237
03. Bantaeng	264,586,658	308,709,496
04. Jeneponto	366,873,769	457,875,255
05. Takalar	397,883,758	424,582,909
06. Gowa	554,655,123	617,800,524
07. Sinjai	346,230,511	407,744,473
08. Maros	419,702,553	482,129,774
09. Pangkep	443,026,718	498,046,761
10. Barru	314,606,111	387,112,425
11. Bone	774,893,028	934,347,132
12. Soppeng	422,251,979	424,592,648
13. Wajo	483,540,656	618,987,861
14. Sidrap	381,550,062	472,097,604
15. Pinrang	427,973,740	506,115,178
16. Enrekang	313,092,522	375,325,196
17. Luwu	332,275,956	386,588,967
18. Tator	408,871,892	483,488,173
19. Luwu Timur*	357,171,483	382,856,187
20. Luwu Utara	289,054,877	350,909,438
21. Toraja Utara	232,637,622	309,502,980
22. Makassar	962,974,983	937,797,498
23. Pare-Pare	260,782,038	355,089,549
24. Palopo	302,918,651	319,455,639
Jumlah	9,814,038,024	11,284,506,099

Tabel 1.1 Realisasi Belanja Pegawai Daerah Pemda TK..II Se Sulawesi Selatan
Tahun Anggran 2012-2013 (000 Rp)

Kabupaten/Kotamadya	2012	2013
01. Selayar	222,453,437	247,822,264
02. Bulukumba	455,600,039	494,926,271
03. Bantaeng	241,223,267	282,613,511
04. Jeneponto	347,786,289	396,113,875
05. Takalar	352,922,783	404,914,000
06. Gowa	532,295,728	592,877,142
07. Sinjai	330,576,308	378,459,449
08. Maros	403,673,970	451,629,774
09. Pangkep	419,835,159	476,016,345
10. Barru	290,523,540	350,149,683
11. Bone	711,303,766	826,155,422
12. Soppeng	389,154,978	400,968,735
13. Wajo	446,349,743	535,121,577
14. Sidrap	357,544,754	416,145,971
15. Pinrang	401,820,670	463,386,738
16. Enrekang	291,973,809	338,077,296
17. Luwu	308,310,444	371,009,136
18. Tator	360,145,043	405,008,227
19. Luwu Timur*	321,138,056	346,306,260
20. Luwu Utara	251,962,308	292,226,436
21. Toraja Utara	210,420,796	271,599,993
22. Makassar	827,805,534	827,805,534
23. Pare-Pare	254,406,534	335,812,584
24. Palopo	278,734,524	304,045,589
Jumlah	9,007,961,480	10,209,191,811

Tabel 1.2 Realisasi Belanja Bunga Pemda TK. II Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2012-2013

Kabupaten/Kotamadya	2012	2013
01. Selayar	0	0
02. Bulukumba	0	0
03. Bantaeng	118,340	97,473
04. Jeneponto	0	330,380
05. Takalar	57,400	57,400
06. Gowa	0	0
07. Sinjai	0	0
08. Maros	0	500,000
09. Pangkep	579,058	100,000
10. Barru	7,695,619	5,400,000
11. Bone	2,301,684	2,310,970
12. Soppeng	440,804	736,317
13. Wajo	126,889	200,000
14. Sidrap	6,768,555	3,483,794
15. Pinrang	72,066	104,672
16. Enrekang	0	0
17. Luwu	127,895	195,000
18. Tator	0	0
19. Luwu Timur*	0	0
20. Luwu Utara	0	0
21. Toraja Utara	0	0
22. Makassar	10,280,440	44,336,027
23. Pare-Pare	4,788,879	4,500,000
24. Palopo	3,000,000	3,000,000
Jumlah	36,357,629	65,352,033

Tabel 1.2.1. Realisasi Pengeluaran/Belanja Subsidi Pemda Tk.II Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2012-2013 (000 Rp)

Kabupaten/Kotamadya	2012	2013
01. Selayar	225,000	0
02. Bulukumba	0	0
03. Bantaeng	0	0
04. Jeneponto	0	0
05. Takalar	0	0
06. Gowa	1,540,398	450,000
07. Sinjai	0	0
08. Maros	0	0
09. Pangkep	0	0
10. Barru	0	0
11. Bone	0	29,192,497
12. Soppeng	0	0
13. Wajo	0	0
14. Sidrap	0	0
15. Pinrang	0	0
16. Enrekang	0	0
17. Luwu	0	0
18. Tator	0	0
19. Luwu Timur*	25,000	25,000
20. Luwu Utara	0	0
21. Toraja Utara	0	0
22. Makassar	0	0
23. Pare-Pare	0	0
24. Palopo	0	0
Jumlah	1,790,398	29,667,497

Tabel 1.2.2. Realisasi Pengeluaran /Belanja Hibah Pemda Tk.II Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2012-2013 (000 Rp)

Kabupaten/Kotamadya	2012	2013
01. Selayar	2,606,925	1,500,000
02. Bulukumba	5,167,000	4,395,500
03. Bantaeng	8,812,443	7,781,248
04. Jeneponto	1,487,700	29,101,000
05. Takalar	9,560,749	450,000
06. Gowa	1,540,398	1,570,000
07. Sinjai	3,278,341	18,295,703
08. Maros	4,741,740	8,000,000
09. Pangkep	2,864,628	1,450,000
10. Barru	4,579,974	1,692,483
11. Bone	17,941,500	22,360,909
12. Soppeng	15,329,675	5,130,000
13. Wajo	11,496,391	49,725,110
14. Sidrap	185,000	18,060,000
15. Pinrang	4,771,877	17,173,769
16. Enrekang	4,613,088	17,000,000
17. Luwu	7,164,828	8,190,000
18. Tator	18,858,568	29,050,550
19. Luwu Timur*	5,292,798	3,963,000
20. Luwu Utara	2,288,065	1,659,250
21. Toraja Utara	16,829,580	16,334,146
22. Makassar	12,546,250	60,898,483
23. Pare-Pare	445,000	12,874,000
24. Palopo	14,987,955	9,000,000
Jumlah	177,390,473	345,655,151

Tabel 1.2.3. Realisasi Pengeluaran/Belanja Bantuan Sosial Pemda Tk. II Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2012-2013 (000 Rp)

Kabupaten/Kotamadya	2012	2013
01. Selayar	33,500	1,500,000
02. Bulukumba	1,445,158	1,735,053
03. Bantaeng	2,052,500	1,883,750
04. Jeneponto	1,489,879	2,800,000
05. Takalar	25,140,579	6,000,000
06. Gowa	2,417,811	2,044,000
07. Sinjai	330,600	400,000
08. Maros	950,009	4,500,000
09. Pangkep	5,789,756	3,882,466
10. Barru	761,247	1,352,447
11. Bone	3,055,000	2,802,500
12. Soppeng	0	800,000
13. Wajo	2,404,294	2,600,000
14. Sidrap	6,914,705	20,125,066
15. Pinrang	449,900	1,000,000
16. Enrekang	2,378,652	3,000,000
17. Luwu	1,625,600	1,552,600
18. Tator	881,578	1,961,250
19. Luwu Timur*	21,250	200,000
20. Luwu Utara	1,207,497	1,553,000
21. Toraja Utara	5,372,945	238,905
22. Makassar	8,315,550	0
23. Pare-Pare	430,450	38,000
24. Palopo	3,813,726	1,450,000
Jumlah	77,282,187	63,419,038

Tabel 1.2.4. Realisasi Pengeluaran/Belanja Bagi Hasil Kepada Prop/Kab/Kota Pamda Tk.II Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2012-2013 (000 Rp)

Kabupaten/Kotamadya	2012	2013
01. Selayar	313,804	0
02. Bulukumba	1,878,917	7,743,666
03. Bantaeng	0	1,702,109
04. Jeneponto	0	0
05. Takalar	6,653,968	403,750
06. Gowa	1,046,174	1,675,444
07. Sinjai	0	361,768
08. Maros	0	0
09. Pangkep	350,969	345,313
10. Barru	0	217,813
11. Bone	1,787,242	1,787,242
12. Soppeng	264,576	264,577
13. Wajo	0	0
14. Sidrap	8,220,309	11,282,773
15. Pinrang	455,000	450,000
16. Enrekang	0	0
17. Luwu	1,984,637	1,692,250
18. Tator	28,716,910	0
19. Luwu Timur*	698,731	609,871
20. Luwu Utara	3,816,561	1,557,226
21. Toraja Utara	0	1,844,580
22. Makassar	0	0
23. Pare-Pare	0	0
24. Palopo	0	0
Jumlah	56,187,798	31,938,382

Tabel 1.3. Realisasi Belanja Belanja Tidak Terduga Pemda Tk.II Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2012-2013 (000 Rp)

Kabupaten/Kotamadya	2012	2013
01. Selayar	1,685,829	1,000,000
02. Bulukumba	468,767	500,000
03. Bantaeng	465,119	1,500,000
04. Jeneponto	2,144,284	16,000,000
05. Takalar	3,067,881	11,157,342
06. Gowa	0	500,000
07. Sinjai	3,655,287	2,000,000
08. Maros	213,580	2,500,000
09. Pangkep	653,193	2,008,292
10. Barru	6,000	1,300,000
11. Bone	1,399,487	1,500,000
12. Soppeng	235,552	820,017
13. Wajo	1,181,040	1,250,000
14. Sidrap	1,916,739	3,000,000
15. Pinrang	1,298,429	2,500,000
16. Enrekang	1,099,070	1,250,000
17. Luwu	807,757	3,500,000
18. Tator	269,793	17,000,000
19. Luwu Timur*	705,071	500,000
20. Luwu Utara	282,987	1,500,000
21. Toraja Utara	14,300	73,405
22. Makassar	1,095,249	4,000,000
23. Pare-Pare	220,250	1,350,000
24. Palopo	1,596,630	1,400,000
Jumlah	24,482,294	78,109,056

Tabel 1.3.1 Realisasi Belanja Langsung Pemda Tk. II Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2012-2013 (000 Rp)

Kabupaten/Kotamadya	2012	2013
01. Selayar	209,685,645	332,929,267
02. Bulukumba	244,900,101	320,188,327
03. Bantaeng	203,874,161	304,793,875
04. Jeneponto	198,814,557	263,680,841
05. Takalar	235,625,219	268,686,324
06. Gowa	298,904,350	420,421,797
07. Sinjai	208,842,728	236,778,757
08. Maros	248,035,771	448,182,583
09. Pangkep	303,731,932	379,493,675
10. Barru	203,401,356	216,166,353
11. Bone	374,353,067	531,890,155
12. Soppeng	194,948,901	288,648,725
13. Wajo	384,687,010	394,329,256
14. Sidrap	184,932,936	353,776,777
15. Pinrang	284,383,052	298,852,482
16. Enrekang	210,424,191	255,268,161
17. Luwu	260,799,708	268,908,897
18. Tator	248,288,416	284,806,133
19. Luwu Timur*	331,845,705	361,502,259
20. Luwu Utara	387,210,079	432,853,278
21. Toraja Utara	203,374,614	295,515,398
22. Makassar	1,000,551,059	1,088,940,264
23. Pare-Pare	215,146,787	283,930,396
24. Palopo	222,853,408	238,244,543
Jumlah	6,859,614,752	8,568,788,523

Tabel 1.3.2 Realisasi Belanja Pegawai Dari Belanja Langsung Pemda Tk.II Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2012-2013 (000 Rp)

Kabupaten/Kotamadya	2012	2013
01. Selayar	42,066,520	53,557,769
02. Bulukumba	42,502,751	51,321,247
03. Bantaeng	29,149,751	33,050,587
04. Jeneponto	34,279,051	54,785,603
05. Takalar	12,996,327	17,937,507
06. Gowa	25,440,087	28,238,567
07. Sinjai	17,073,147	20,010,666
08. Maros	19,823,914	29,444,150
09. Pangkep	47,352,541	57,079,471
10. Barru	22,311,669	19,583,476
11. Bone	15,816,509	18,110,653
12. Soppeng	26,481,552	45,390,116
13. Wajo	29,001,307	26,852,240
14. Sidrap	23,048,647	40,343,661
15. Pinrang	21,799,678	21,455,196
16. Enrekang	15,338,421	28,875,808
17. Luwu	27,820,753	31,561,395
18. Tator	27,577,948	33,561,306
19. Luwu Timur*	22,321,252	28,195,446
20. Luwu Utara	32,794,401	8,575,046
21. Toraja Utara	16,148,042	17,496,838
22. Makassar	146,418,127	192,154,527
23. Pare-Pare	17,451,638	21,254,458
24. Palopo	25,963,965	29,580,593
Jumlah	740,977,998	908,416,326

Tabel 1.3.3. Realisasi Belanja Barang Dan Jasa Dari Belanja Langsung Pemda Tk.II Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2012-2013 (000 Rp)

Kabupaten/Kotamadya	2012	2013
01. Selayar	82,541,080	93,895,204
02. Bulukumba	101,886,983	128,972,730
03. Bantaeng	98,531,773	131,278,292
04. Jeneponto	67,376,465	86,474,925
05. Takalar	124,527,752	150,597,282
06. Gowa	127,355,497	160,564,533
07. Sinjai	102,828,711	112,847,444
08. Maros	96,913,230	149,718,889
09. Pangkep	96,355,921	125,207,140
10. Barru	73,470,870	97,947,352
11. Bone	164,385,602	259,348,375
12. Soppeng	89,543,705	113,040,098
13. Wajo	140,332,308	165,983,726
14. Sidrap	81,771,148	152,028,119
15. Pinrang	120,873,729	139,661,275
16. Enrekang	102,225,792	98,307,454
17. Luwu	79,930,665	105,790,725
18. Tator	111,257,899	136,129,803
19. Luwu Timur*	186,556,369	177,561,792
20. Luwu Utara	125,470,116	134,908,851
21. Toraja Utara	88,684,919	115,491,938
22. Makassar	535,514,552	574,900,382
23. Pare-Pare	117,500,364	130,674,694
24. Palopo	99,012,851	110,211,441
Jumlah	3,014,848,300	3,651,542,463

Tabel 1.3.4. Realisasi Pengeluaran/Belanja Modal Pemda Tk. II Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2012-2013 (000 Rp)

Kabupaten/Kotamadya	2012	2013
01. Selayar	85,078,045	185,476,294
02. Bulukumba	100,510,366	139,894,350
03. Bantaeng	76,192,637	140,464,995
04. Jeneponto	97,159,041	122,420,313
05. Takalar	98,101,140	100,151,535
06. Gowa	146,108,766	231,618,697
07. Sinjai	88,940,870	103,920,647
08. Maros	131,298,627	269,019,544
09. Pangkep	160,023,470	197,207,064
10. Barru	107,618,817	98,635,525
11. Bone	194,150,956	254,431,127
12. Soppeng	78,923,644	130,218,511
13. Wajo	215,353,395	201,493,290
14. Sidrap	80,113,140	161,404,997
15. Pinrang	141,709,645	137,736,011
16. Enrekang	92,859,977	128,084,898
17. Luwu	153,048,290	131,556,777
18. Tator	109,452,569	115,115,024
19. Luwu Timur*	122,968,084	155,745,021
20. Luwu Utara	228,945,562	289,369,382
21. Toraja Utara	98,541,654	162,526,623
22. Makassar	318,618,379	321,885,355
23. Pare-Pare	80,194,785	132,001,244
24. Palopo	97,876,592	98,452,508
Jumlah	3,103,788,453	4,008,829,734

<http://sulsel.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROPINSI SULAWESI SELATAN**

*Jl. Haji Bau No. 6 Makassar
Email : bps7300@bps.go.id*